

PEMBERDAYAAN SEKTOR INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KOTA MADIUN MENGHADAPI EKONOMI ASEAN 2015

Dra. Mamik Sumarmi, M.Si
UPBJJ-UT Surabaya
mamiksumarmi@ut.ac.id

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan UKM di Kota Madiun, dan usaha pemerintah daerah agar pemberdayaan UKM meningkat bersama ekonomi Asean.

Metode penulisan makalah ini menggunakan kajian teori literature tentang faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan UKM di Kota Madiun dan usaha- usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pemberdayaan UKM meningkat bersama ekonomi Asean.

Hasil dan pembahasan bahwa faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan UKM di Kota Madiun adalah a) kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan mahal biaya tenaga kerja, b) dalam bidang pemasaran, banyaknya pesaing yang bergerak dalam industri yang sama, relative minimnya kemampuan bahasa asing dalam melakukan negosiasi, dan penetrasi pasar di luar negeri, c) kesulitan melakukan pendataan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena menjamurnya UMKM sedangkan pelaku usaha tidak melaporkan usahanya ke dinas, d) keterbatasan jumlah personil yang hanya 8 (delapan) orang. Usaha yang dilakukan pemerintah daerah agar pemberdayaan UKM di Kota Madiun meningkat bersama ekonomi Asean adalah menghimbau agar: a) UKM mempunyai daya pikir kreatif jauh ke depan sehingga memiliki perencanaan tidak saja jangka pendek, namun bersifat jangka panjang, b) belajar dari pengalaman orang lain, kegagalan dan terbuka menerima kritik dan saran untuk masukan pengembangan UKM, c) bertindak inovatif, yaitu selalu berusaha meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam setiap aspek kegiatan UKM, d) berani mengambil risiko dan memiliki manajemen risiko segala aktivitas usahanya, e) mengadakan monitoring secara keseluruhan dan evaluasi, untuk mengetahui permasalahan di lapangan yang dapat menghambat berkembangnya UKM.

Kata Kunci: Pemberdayaan, UKM

PENDAHULUAN

ASEAN *Economic Community* (AEC) merupakan salah satu bentuk *Free Trade Area* (FTA) dan berlokasi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN *Economic Community* yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomian lebih maju dibandingkan dengan kondisi Negara ASEAN saat ini. Selain itu juga dengan terwujudnya ASEAN *Economic Community*, dapat menjadikan posisi

ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Internasional. Dengan terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak, sehingga terjadi suatu dialog antar sektor yang nantinya juga saling melengkapi di antara para stakeholder sektor ekonomi di Negara-negara ASEAN dan ini sangatlah penting.

ASEAN *Economic Community* ini terintegrasi lewat kerja sama ekonomi regional yang diharapkan mampu memberikan akses yang lebih mudah, tidak terkecuali perdagangan luar negeri. Indonesia adalah *market* yang cukup besar bagi produsen- produsen suatu produk untuk menawarkan barangnya. Banyak produsen luar negeri beranggapan Indonesia menjadi salah satu sasaran pemasaran yang paling menguntungkan dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Faktor ekonomi yang paling dominan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah sumber daya manusia yang berperilaku kewirausahaan berwawasan global. SDM yang berperilaku kewirausahaan global akan mampu meningkatkan produktivitas perdagangan internasional sektor riil yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional.

Salah satu kewirausahaan yang dapat meningkatkan produktivitas perdagangan nasional dan internasional adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dasar hukum yang memayungi aturan tentang Usaha Kecil dan Menengah adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UU 20/2008) dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP 17/2013).

Dalam penjelasan umum UU 20/2008 dikatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Usaha kecil dan menengah yang tertulis dalam UU 20/2008 dijelaskan sebagai berikut:
www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52977267cc439uuketnagaan

Pasal 1 angka 2 UU 20/2008: Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 3 UU 20/2008: Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan ditetapkannya otonomi daerah, peranan masing-masing daerah dapat leluasa mengatur, mengembangkan dan memajukan daerahnya sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Sebagai implementasinya Pemerintah Kota Madiun dalam menyusun Rencana Strategi Daerah (Renstrada) kota Madiun 2004 - sekarang mencantumkan arah

kebijaksanaan umum yang lebih menekankan pada peningkatan pertumbuhan yang berbasis pada usaha kecil, menengah dan koperasi serta adanya kemitraan dengan usaha besar yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja.

Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di wilayah kota Madiun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2008 jumlah UMKM mencapai 21.800 unit, tahun 2009 naik menjadi 22.334 unit, dan hingga akhir tahun 2011 naik menjadi 22.790 unit, akhir tahun 2014 sebanyak 22.792 unit usaha. Ribuan UKM tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya konveksi, jasa, produksi makanan, produksi minuman, kerajinan, perdagangan dan lain-lain.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pendukung peningkatan UKM dengan beberapa cara antara lain pemberian bantuan langsung ataupun dana bergulir dari dinas terkait yang bersumber dari APBD, APBD Propinsi, maupun APBN. Selain itu Pemkot Kota Madiun juga berupaya untuk memudahkan akses pemberian bantuan modal usaha dari berbagai lembaga baik negeri maupun pihak swasta.

Dikaitkan dengan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun dikatakan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Madiun, Maidi, bahwa dari berbagai sektor mengalami peningkatan juga seiring dengan membaiknya iklim pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun mencatat Capaian PAD pada tahun 2010 telah menyentuh angka Rp 41.7 miliar, sedangkan tahun 2011 capaian PAD menjadi Rp 61,3 miliar.

Dari jumlah tersebut bidang yang mendominasi dalam berkontribusi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai 40,81 persen dari total yang ada. Bidang penyumbang kedua adalah sektor industri pengolahan yang mencapai 17,26 persen, lalu sektor jasa yang mencapai 14,77 persen, serta sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai 13, 18 persen, sisanya didukung oleh sejumlah sektor kecil seperti sektor pertanian, bangunan pertambangan, penggalian dan UKM. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun tercatat baik, sesuai data yang ada, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 tercatat sebesar 7,18 persen.

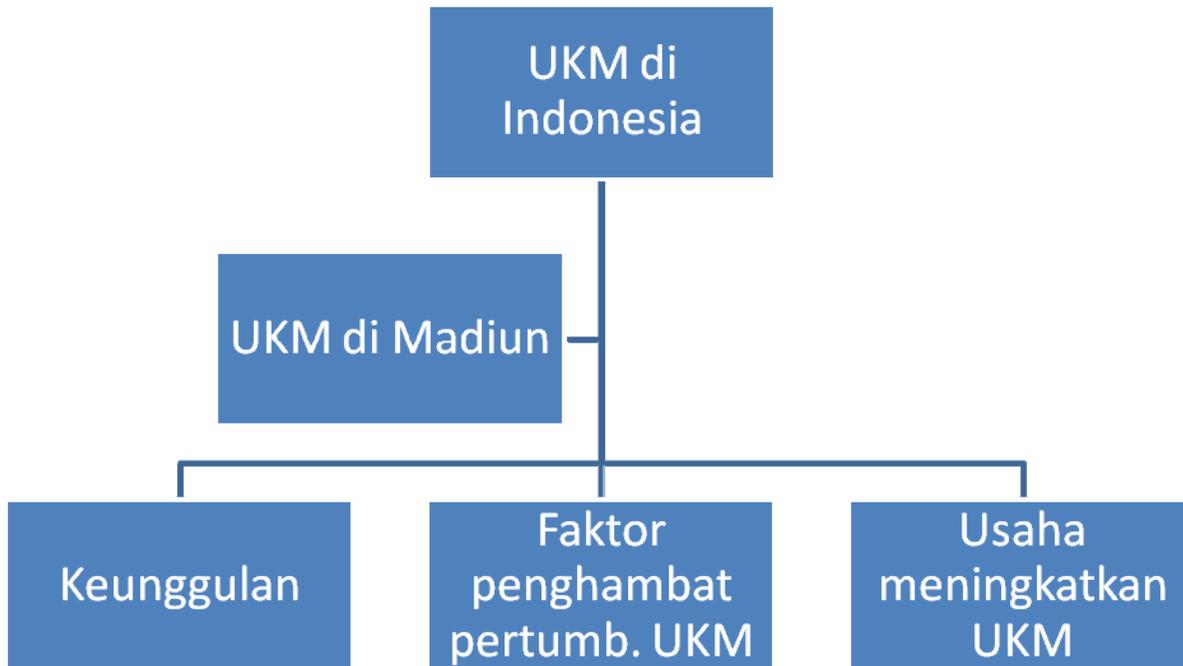
Walaupun dilihat dari data beberapa sektor yang mendukung Pendapatan Asli daerah (PAD) meningkat setiap tahun, namun jumlah tenaga kerja sebagai pencari kerja setiap tahun juga meningkat. Data Dinas tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun mencatat jumlah pencari kerja hingga pertengahan Mei 2015 mencapai 1400 orang lebih, rata-rata mereka adalah berpendidikan SMA dan sarjana. Kondisi tersebut nantinya masih ditambah dengan jumlah lulusan tingkat SMA tahun ini yang belum tertampung di dunia kerja. Dari seluruh lulusan SMA sederajat setiap tahun sekitar 2.800 anak, yang melanjutkan bekerja rata-rata hanya mencapai 70 persen, sisanya menganggur.

Dari data jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang setiap tahun ada peningkatan, namun pemberdayaan UKM sampai saat ini belum maksimal, terbukti belum termasuk penyumbang PAD yang dapat diandalkan. Karena belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah, maka UKM di Kota Madiun belum bisa bersama ekonomi Asean. Oleh karena itu UKM harus ditingkatkan dan diperhatikan oleh pemerintah daerah agar dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bisa bersama ekonomi Asean.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pertumbuhan UKM di Kota Madiun?
2. Bagaimana usaha pemerintah daerah agar pemberdayaan UKM di Kota Madiun meningkat dan dapat bersama ekonomi Asean?

KERANGKA TEORI



Keterangan:

1. UKM di Indonesia: menurut Piore dan Sabel, 1984 (dalam Tulus Tambunan, 2009) menegaskan bahwa UMKM telah menjadi bentuk dominan dari organisasi industri. UMKM tersebut dikenal sebagai perusahaan yang mengerjakan pekerja-pekerja dengan keterampilan tinggi dan multi., menggunakan mesin-mesin yang fleksibel yang mengandung teknologi mutakhir dan membuat sejumlah produk khusus variatif dalam volume kecil untuk pasar global.
2. UKM di Madiun: Data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Madiun mencatat pada tahun 2008 jumlah UMKM mencapai 21.800 unit, tahun 2009 naik menjadi 22.334 unit, dan hingga akhir tahun 2011 naik menjadi 22.790 unit, akhir tahun 2014 sebanyak 22.792 unit usaha. Ribuan UKM tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya konveksi, jasa, produksi makanan, produksi minuman, kerajinan, perdagangan dan lain-lain. Namun UKM yang menjamur tersebut belum termasuk penyumbang PAD yang dapat diandalkan. Karena belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
3. Keunggulan UKM di Madiun: Perkembangan jumlah UKM sangat cepat karena pencari kerja setiap tahun juga bertambah. Pencari kerja akhir tahun 2014 mencapai 1400 dari lulusan SLTA dan sarjana. Selain itu peserta UKM ditawarkan pinjaman untuk modal oleh Pemkot.

4. Faktor penghambat : kurang terampil tenaga pekerjanya, keterbatasan petugas dari Disperindag Kota Madiun, maka permasalahan peserta UKM kurang cepat terselesaikan, Pelaku usaha ada yang tidak bertahan lama atau fluktuatif, mobilitas UKM terlalu cepat, suatu saat mereka berjualan, suatu saat mereka berhenti.
5. Usaha menanggulangi: selain melakukan monitoring secara keseluruhan, para peserta UKM dihimbau agar mempunyai daya pikir kreatif yang selalu berpikir secara visionaris (melihat jauh ke depan), mau menerima kritik dan saran untuk masukan pengembangan UKM, berani mengambil risiko.

METODOLOGI

Penulisan makalah ini menggunakan kajian teori literature tentang pemberdayaan dan tentang UKM serta Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan UKM di Kota Madiun dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pemberdayaan UKM di Kota Madiun meningkat dan dapat bersama ekonomi Asean.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pemberdayaan dan UKM

Menurut Sumodiningrat, 1999 (dalam Mardi Hutomo 2000) menyebutkan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

Ginandjar Kartasasmita, 1996 menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat adalah Upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Dari pendapat-pendapat tentang pemberdayaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Pendapat yang lain dari Sumodiningrat, 2001 menyatakan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Selanjutnya Kartasasmita, 1996 menyatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemampuan diri mereka masing-masing.

Upaya memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai juga ditegaskan oleh Siswanto, 1997 yang menyatakan secara empirik, banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat lebih mampu mengidentifikasi, menilai, dan memformulasikan permasalahannya baik fisik, sosial kultur maupun ekonomi dan kesehatan lingkungan, membangun visi dan aspirasi dan kemudian memprioritaskan, intervensi, merencana, mengelola, memonitor dan bahkan memilih teknologi yang tepat.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, maka dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktivitasnya sektor riil yang dijalankan oleh UKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara maupun daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia, UKM sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM sangat membantu Negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga –tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan didukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. <http://applelovestory.wordpress.com/pengembangan-usaha-kecil-menengah>

Selanjutnya kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya kualitas produk. Walau diakui pula bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja di Indonesia, tetapi kontribusi dalam output nasional di katagorikan rendah. Hal ini dikarenakan UMKM, khususnya usaha mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja), mempunyai produktivitas yang sangat rendah. Bila upah dijadikan produktivitas, upah rata-rata usaha mikro umumnya berada di bawah upah minimum. Kondisi ini merefleksikan produktivitas sektor mikro yang rendah di bandingkan dengan usaha yang lebih besar.

Lain dengan pendapat Hayter, 2000 menjelaskan adanya dampak positif yang berlanjut dari keberadaan UKM dalam pembangunan daerah. Kontribusinya terhadap pembangunan

lokal/daerah adalah kemampuan menggali potensi daerah sekaligus menentukan pola pembangunan ekonominya.

Sedangkan menurut Tulus tambunan, 2012 definisi UMKM di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang telah disebutkan dalam pendahuluan. Dikaitkan dengan tenaga kerja sesuai UU tersebut pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

Dengan kriteria ini, Usaha Mikro (UMI) adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak Rp 50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. UK (Usaha Kecil) dengan nilai asset Rp 50 juta –Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300 juta-2.500.000.000. UM (Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih Rp 500 juta – Rp 10 Milyar, atau memiliki hasil penjualan Rp 2.500.000.000.00 (2.500 milyar-Rp Rp50. 000.000.000 (50. Milyar).

Selanjutnya selain menggunakan kriteria moneter, Tulus Tambunan, 2009 mengatakan bahwa sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara UMI, UK, UM dan UB.

Kemudian disebutkan kriteria dari BPS, UMI (sektor industri manufaktur umum disebut industri rumah tangga) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang. UK antara 5-1019 pekerja. UM dari 20-99 pekerja. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori UB (Usaha Besar).

Salah satu teori modern yang ditulis oleh Piore and Sabel, 1984 (dalam Tulus Tambunan, 2009) mengenai *the second industrial divide*. Dalam bukunya, mereka mendiskusikan munculnya kembali lokasi-lokasi pengrajin di sejumlah Negara di Eropa Barat, yakni Italia, Austria dan Jerman. Dalam mempelajari perkembangan lokasi-lokasi pengrajin tersebut, Piore dan Sabel (1984) menegaskan bahwa UMKM telah menjadi bentuk dominan dari organisasi industri. UMKM tersebut dikenal sebagai perusahaan yang mengerjakan pekerja-pekerja dengan keterampilan tinggi dan multi., menggunakan mesin-mesin yang fleksibel yang mengandung teknologi mutakhir dan membuat sejumlah produk khusus variatif dalam volume kecil untuk pasar global.

Disebutkan pula oleh Piore and Sabel (1984) dalam Tulus Tambunan, 2009 bahwa teknologi-teknologi baru seperti komputer, dan alat-alat monitor dan kontrol mesin pabrik membuat skala ekonomi menjadi kurang penting, yang selanjutnya membuat pabrik-pabrik kecil menjadi lebih efisien, dan ini semua mempromosikan kelayakan relative UMKM dalam era globalisasi.

Kebutuhan meningkatkan kemampuan industri untuk memenuhi perubahan-perubahan pasar yang cepat khususnya pasar global dengan tepat waktu, murah, dan efisien telah menciptakan peran baru bagi UMKM di Negara Maju (NM). Namun juga merupakan tantangan karena dalam jangka panjang, ekonomi akan dikuasai oleh Usaha Besar (UB) dalam *output* maupun kesempatan kerja.

Dijelaskan oleh Tulus Tambunan 2009 bahwa sejak buku Piore dan Sabel (1984) diterbitkan, tidak hanya karakteristik dan bentuk baru organisasi industri didiskusikan secara luas, tetapi beberapa peneliti juga telah berusaha mengkaji relevansi terhadap industri yang didominasi oleh UMKM di Negara Maju (NM) dan juga peneliti terhadap industri di Negara Sedang Berkembang (NSB).

Pendapat lain dari Suhendi dan Indra Sasongko, 2014 menjelaskan bahwa kedudukan UKM mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem perekonomian nasional karena beberapa hal antara lain: a. jumlah unit usaha sangat besar tercatat sekitar 3,4 juta, b. menyerap banyak tenaga kerja, tahun 2006 sebanyak 8,7 juta orang, c. sebagai kreditor relative patuh dalam pengembangan modal, d. daya tahan UKM cukup tinggi dalam menghadapi berbagai gejolak.

Selanjutnya dikatakan bahwa UKM adalah tulang punggung perekonomian yang telah berulang kali terbukti menyumbang lebih dari 50 % Pendapatan Domesti Bruto (PDB). Apabila dikaitkan dengan globalisasi, UKM telah memberikan isyarat bahwa masa ke depan akan diwarnai oleh persaingan yang semakin ketat antar pelaku usaha. Oleh sebab itu pelaku usaha khususnya yang berskala UKM perlu mempersiapkan strategi yang tepat untuk membuat UKM Indonesia mampu menghadapi persaingan, baik dalam skala nasional, regional maupun global.

Dijelaskan pula bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) perlu dipersiapkan agar mampu bertahan hidup dan berkembang walaupun harus menghadapi persaingan dengan pelaku ekonomi yang lebih kuat, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Berbagai program pembinaan terhadap UKM yang dilakukan selama ini tampaknya tidak terlalu memperhatikan ciri-ciri khas UKM yang sesungguhnya perlu dimanfaatkan secara tepat agar dapat menjadi kekuatan yang tidak bisa disaingi oleh pelaku-pelaku ekonomi yang lebih kuat.

UKM memiliki ciri-ciri yang unik, yang menyebabkan tidak tepat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Tetapi ciri-ciri yang khas itu pula yang menyebabkan menjadi unggul apabila UKM mengambil posisi tertentu dalam dunia industri maupun dunia usaha.

Adapun ciri-ciri Usaha kecil tersebut adalah :1. Umumnya dikelola oleh pemiliknya, 2. Struktur oganisasinya sederhana, 3. Pemilik mengenal karyawan-karyawannya, 4. Persentase kegagalan perusahaan tinggi, 5. Kekurangan manajer-manajer ahli, 6. Modal jangka panjang sulit diperoleh, 7. Jumlah karyawan sedikit.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara maupun daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia, UKM sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM sangat membantu Negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga –tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar.

2. Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan UKM di Kota Madiun

Secara umum informasi masalah-masalah yang dihadapi oleh UKM adalah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yaitu tidak terampil dan mahal biaya tenaga kerja. Regenerasi perajin dan pekerja terampil relative lambat. Akibatnya di banyak sentra ekspor mengalami kelangkaan tenaga terampil untuk sektor tertentu.

Dalam bidang pemasaran, masalahnya terkait dengan banyaknya pesaing yang bergerak dalam industri yang sama, relative minimnya kemampuan bahasa asing sebagai suatu hambatan dalam melakukan negosiasi, dan penetrasi pasar di luar negeri.

Selain faktor umum penghambat pertumbuhan UKM, informasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (Disperindagkoppar) Kota Madiun mengaku kesulitan untuk melakukan pendataan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena menjamurnya UMKM sedangkan pelaku usaha tidak melaporkan usahanya ke dinas.

Kepala Disperindagkoppar kota Madiun Totok Sugiharto mengatakan bahwa petugas juga kesulitan untuk melakukan pendataan terhadap banyaknya UMKM yang tidak bertahan lama atau fluktuatif.

Kalau data UMKM secara fix susah karena pendataan sempat mengalami ada penurunan data, tapi suatu saat bertambah. Jadi mobiling mereka itu berlaku terlalu cepat, suatu saat mereka berjualan, suatu saat mereka berhenti. Jadi mereka itu tidak bisa secara continue melakukan kegiatan terus menerus.

Pihaknya menambahkan untuk melakukan pemantauan terhadap UMKM selama ini terkendala keterbatasan jumlah personil yang hanya 8 (delapan) orang. Oleh karena itu petugas tidak dapat memonitoring perkembangan keseluruhan UMKM, namun hanya dilakukan *random sampling* (pemilihan acak).

Dari beberapa informasi dari Kepala Disperindagkoppar kota Madiun yang ditulis melalui <http://www.rri.co.id/post/berita/134503/ekonomi/disperindagkoppar-kota-Madiun> dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat UKM Kota Madiun adalah: a) kurangnya tenaga pekerja terampil dalam bidang usahanya, b) Kesulitan melakukan pendataan karena menjamurnya UKM, tetapi tidak melaporkan usahanya ke dinas, c) Pelaku usaha ada yang tidak bertahan lama atau fluktuatif, d) Mobilitas UKM terlalu cepat, suatu saat mereka berjualan, suatu saat mereka berhenti, e) Terbatasnya tenaga dari Disperindagkoppar Kota Madiun yang melaksanakan monitoring terhadap pelaku-pelaku usaha (UKM).

3. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pemberdayaan UKM di Kota Madiun meningkat dan dapat bersama ekonomi Asean.

Agar jumlah peserta UKM bertambah banyak dan berkualitas, secara umum sebaiknya para peserta UKM memiliki beberapa hal, *pertama*, daya pikir kreatif yang selalu berpikir secara visionaris (melihat jauh ke depan) sehingga memiliki perencanaan tidak saja jangka pendek, namun bersifat jangka panjang. *Kedua*, belajar dari pengalaman orang lain, kegagalan dan dapat terbuka menerima kritik dan saran untuk masukan pengembangan UKM, *ketiga*, bertindak inovatif, yaitu selalu berusaha meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam

setiap aspek kegiatan UKM, *keempat*, berani mengambil risiko dan menyesuaikan profil risiko serta mengetahui risiko dan manfaat dari suatu bisnis. UKM harus memiliki manajemen risiko dalam segala aktivitas usahanya.

Selain himbauan tersebut masih ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kinerja para peserta UKM adalah: a) mengadakan monitoring secara keseluruhan dan evaluasi, bertujuan untuk mengetahui permasalahan di lapangan yang dapat menghambat berkembangnya UKM, b) Keterbatasan petugas monitoring, maka pelaksanaannya dijadwal secara bertahap atau menambah person petugas monitoring.

PENUTUP

Kesimpulan

UKM sangat penting dikembangkan karena merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan mempunyai jumlah unit usaha sangat besar, banyak menyerap tenaga kerja serta mempunyai daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai gejolak .

Menghadapi Ekonomi ASEAN, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya UKM di Kota Madiun mempunyai perkembangan jumlah yang sangat cepat karena pencari kerja setiap tahun bertambah sejalan dengan jumlah lulusan SLTA dan Sarjana yang berstatus sebagai pencari kerja.

Adapun faktor penghambat kualitas UKM di Madiun antara lain a) kurangnya tenaga terampil dalam bidang usahanya, b) Kesulitan melakukan pendataan karena menjamurnya UKM, tetapi tidak melaporkan usahanya ke dinas, c) Pelaku usaha ada yang tidak bertahan lama atau fluktuatif, d) Mobilitas UKM terlalu cepat, suatu saat mereka berjualan, suatu saat mereka berhenti, e) Terbatasnya tenaga dari Disperidagkoppar Kota Madiun yang melaksanakan monitoring terhadap pelaku-pelaku usaha (UKM).

Usaha menanggulangi kemajuan UKM yang berkualitas selain memberikan pinjaman modal dari Pemkot Kota Madiun, Disperindag Kota Madiun akan melakukan monitoring secara keseluruhan kepada para peserta UKM secara bertahap. Selain itu, UKM dihimbau agar mempunyai daya pikir kreatif yang selalu berpikir secara visionaris (melihat jauh ke depan), mau menerima kritik dan saran untuk masukan pengembangan UKM, serta berani mengambil risiko.

Saran

Sebaiknya pemberdayaan sumber daya manusia menuju kesejahteraan masyarakat melalui UKM di Kota Madiun, perlu adanya pelatihan peningkatan wawasan berbagai keterampilan dan manajemen untuk meningkatkan kualitas dan ketertiban manajemen suatu usaha. Monitoring terhadap UKM sangat penting untuk menangani permasalahan-permasalahan yang muncul dari peserta UKM yang segera mendapatkan solusi dari petugas Disperindag, kalau jumlah person petugasnya kurang mencukupi, perlu ditambah agar semua peserta UKM bisa terpantau.



DAFTAR PUSTAKA

Ginanjari Kartasasmita. 1996. Pembangunan untuk rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. PT Pustaka Cidesindo. Jakarta.

Siswanto. 1997. Melalui perkembangan komunitas Membangun Sektor Perumahan dan Pemukiman. Makalah pada Loka Karya Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Pemukiman. 16-17 Juli 1997. BAKN. Jakarta.

Suhendi dan Indra Sasongko. 2014. Pengantar Bisnis. Alfabeta . Bandung

Tambunan, Tulus. 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Isu-isu penting. Penerbit LP3ES. Jakarta.

www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52977267cc439uuketenagaan

[www://pendidikan ekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi](http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi)

<http://applelovestory.wordpress.com/pengembangan-usaha-kecil-menengah> diakses tg 26 Juni 2015

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/98672/jumlah-umkm-di-kota> Madiun